

**KETIKA UMAT MENINGGALAKAN ULAMA:
Perilaku Politik Umat Islam Pasca PRRI 1959-1972**

Mhd. Ilham

Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Imam Bonjol Padang
email: ilhamfadli1974@gmail.com

Abstract

This research is historical research. Aims to reveal the shift in political preferences of the Ummah in Pasaman District after the PRRI rebellion. In this study it was found that ulama are the most significant historically-factual-implicative social elite. This can be seen from the existence and influence of the Muhammadiyah and the Masyumi party in the early 1950s to 1957, two organizations which were significantly influenced by the ulamas. After the PRRI rebellion in 1957 and the operation of mass destruction of the remaining PRRI sympathizers in this area in 1958, there was a shift in the socio-political preferences of the Muslims in Pasaman Regency. Shifts in a very fast time span. Ulama which has been considered as the main reference in determining political choices, shifts to other social elites, local non-clerical political elites. The PRRI rebellion left psychological trauma for Muslims in Pasaman District, which contributed greatly to changing the socio-political preferences of the Muslim Ummah and decreasing the level of Islamic belief in the ulamas.

Keywords: Muslims, Ulama, Political Behavior, PRRI

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian sejarah. Bertujuan untuk mengungkap pergeseran preferensi politik umat Islam di Kabupaten Pasaman setelah terjadinya pemberontakan PRRI. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ulama merupakan elit sosial yang paling signifikan secara historis-faktual-implikatif. Ini terlihat dari eksistensi dan pengaruh dari Muhammadiyah serta partai Masyumi pada awal tahun 1950 hingga 1957, dua organisasi yang dipengaruhi secara signifikan oleh ulama. Setelah terjadi pemberontakan PRRI tahun 1957 serta dilaksanakannya operasi penumpasan sisa-sisa simpatisan PRRI secara massif di daerah ini pada tahun 1958, terjadi pergeseran preferensi sosial politik umat Islam di Kabupaten Pasaman. Pergeseran dalam rentang waktu yang sangat cepat. Ulama yang selama ini dianggap sebagai rujukan utama dalam menentukan pilihan politik, bergeser kepada elit sosial lainnya, elit politik lokal non-ulama. Pemberontakan PRRI meninggalkan trauma psikologis bagi umat Islam di Kabupaten Pasaman tersebut berkontribusi besar dalam merubah preferensi sosial politik umat Islam dan menurunnya tingkat kepercayaan umat Islam kepada ulama.

Kata Kunci: Umat Islam, Ulama, Perilaku Politik, PRRI

PENDAHULUAN

Realitas Politik Kekinian

Ada satu pertanyaan umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pasca pemekaran. Bukan bermaksud untuk terkesan rasis, pertanyaan tersebut terus bergema hingga saat sekarang yaitu : “Mengapa kaum wanita Minangkabau di Pasaman Barat tidak ada yang menonjol kiprah mereka di ranah sosial politik daerah dan nasional ?”. “Mengapa tokoh wanita Mandahiling¹ justru yang lebih aktif dan diakui publik?”. Pertanyaan-pertanyaan ini terkesan rasional bila mengingat kiprah tokoh-tokoh wanita yang berasal dari etnik Minangkabau di daerah Pasaman Barat setelah kemerdekaan, cukup besar dan signifikan, terutama kiprah mereka dalam bidang sosial politik. Untuk konteks spasial Pasaman Barat pada masa itu, banyak wanita-wanita etnik Minangkabau yang berkiprah secara aktif dalam organisasi politik Masyumi² dan organisasi sosial keagamaan Aisyiyah.³

Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, kiprah wanita Minangkabau dalam ranah politik tersebut bisa dikatakan tidak muncul ke permukaan. Secara demografis,

¹ Lihat: www.kpu.go.id/kpu-sumber/. Lihat juga www.emmayohanna.blogspot.com

² Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Partai Masyumi*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1998). Lihat juga studi Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982) dan Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Graffiti Press, 1988)

³ Badruzzaman Busyaeri, *Falsafah Perjuangan Aisyiyah*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1989) dan Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, (edisi revisi), (Yogyakarta: Persatuan, 1994).

Pasaman Barat dihuni oleh tiga etnik utama yaitu etnik Minangkabau, Mandailing dan Jawa.⁴ Dua etnik pertama merupakan etnik mayoritas, dan dianggap sebagai etnik “pribumi” daerah ini. Sementara etnik yang kedua, jumlahnya cukup signifikan, tapi hingga sekarang masih dianggap sebagai etnik pendatang yang terkonsentrasi di daerah-daerah transmigrasi di kabupaten Pasaman Barat ini.

Dalam konteks sosiologis, komposisi demografis yang cenderung seimbang tersebut, membuat ke tiga etnik ini memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah dalam dunia politik. Hal ini terlihat dari kehadiran tokoh-tokoh politik Pasaman Barat, pada umumnya laki-laki, hingga sekarang terlihat “merata” dari ketiga etnik tersebut. Tetapi, tokoh politik yang berasal dari kalangan wanita, cenderung didominasi oleh etnik Mandailing.

Padahal “tradisi politisi” dan kesempatan untuk berkecimpung dalam ranah politik, tidak hanya dimiliki para wanita yang berasal dari etnik Mandailing tersebut. Bila ditelusuri jauh kebelakang, di beberapa organisasi politik dan organisasi sosial keagamaan, banyak dijumpai wanita-wanita aktif dan agresif, tentunya dengan menggunakan parameter temporal-spasial masa itu. Organisasi sosial keagamaan seperti Aisyiyah, misalnya, didominasi oleh wanita-wanita etnis Minangkabau. Dalam konteks historis, kedekatan Minangkabau dengan Aisyiyah tidak bisa dilepaskan dari realitas sejarah dimana organisasi sosial

⁴ Mochtar Naim, “Pasaman Barat: Kasus Daerah Pinggiran,” *Prisma*, No. 3 tahun 1975, h. 46-47

keagamaan Muhammadiyah beserta “organ-organ” organisasinya, “hanya” berkembang dan diterima secara luas di Yogyakarta (sebagai pusat/tempat lahirnya organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan ini) dan di Minangkabau. Sementara, di daerah-daerah Sumatera Utara, khususnya *enclave* Mandailing di Tapanuli Selatan (dan Kabupaten Mandailing-Natal sekarang), lebih *familiar* dengan Nahdhatul Ulama (NU).

Demikian juga halnya dengan kiprah mereka di Masyumi Kecamatan Sungai Beremas dan Kabupaten Pasaman, cukup signifikan.⁵ Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa Orde Baru, “tradisi politisi” hilang. Timbul kesan bahwa “tradisi politisi” tersebut hilang satu generasi pada wanita-wanita aktifis di Kecamatan Sungai Beremas.

METODE PENELITIAN

Lingkup Temporal

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) adalah suatu organisasi wanita yang muncul pada awal tahun 1950 yang kemudian dibubarkan pasca peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok). Karena itu, dalam pembahasan diambil batasan waktu antara tahun 1958 hingga tahun 1965. Pembatasan ini didasarkan pada asumsi bahwa setelah terjadinya pemberontakan PRRI tahun 1958, implikasi sosial politik peristiwa ini terasa hingga ke daerah *pheryphery* di Sumatera Barat yang selama ini

⁵ Disimpulkan dari *wawancara* dengan Hj. Encik Mas (73 tahun, aktifis Masyumi Kecamatan Sungai Beremas, Ketua Aisyiah Kecamatan Sungai Beremas dan pengurus inti Aisyah Kab. Pasaman pada era Soekarno dan aktifis Aisyiyah Kecamatan Sungai pada Orde Baru. Beliau sempat mengikuti beberapa kegiatan Gerwani pada tahun 1964-1965) pada tanggal 28 Agustus 2010 di Air Bangis. Wawancara ini dilakukan sebelum beliau wafat pada bulan Nopember 2010.

dikuasai oleh Masyumi (partai politik) dan Muhammadiyah (organisasi sosial keagamaan).

Pasca pemberontakan PRRI ini, pengaruh dua organisasi politik dan sosial keagamaan mulai memudar karena beberapa tokoh “kunci” (terutama tokoh Masyumi yang dianggap sebagai simpatisan PRRI) banyak ditangkap dan melarikan diri. Hal ini terasa sekali di daerah-daerah pesisir pantai Pasaman (sekarang : Pasaman Barat) yang secara historis dan politis pada tahun 1950-an, Masyumi begitu kuat (termasuk dalam hal ini organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah yang tetap berpengaruh hingga sekarang). Dengan banyaknya tokoh-tokoh kunci Masyumi dan Muhammadiyah ditangkap dan melarikan diri, terjadi *vacuum of ideology*. Dalam kondisi ini, diasumsikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani mulai masuk dalam kehidupan sosial politik masyarakat di pantai barat Pasaman.⁶ Sedangkan tahun 1965 merupakan akhir dari kiprah Gerwani di kancah politik Indonesia terkait dengan adanya peristiwa 30 September 1965.

Lingkup Spasial

Lingkup spasial penelitian ini adalah adalah Kecamatan Sungai Beremas yang merupakan salah satu kenagarian di Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Sungai Beremas secara kuantitatif memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak diantara Kecamatan-Kecamatan di pantai barat Pasaman Barat. Dipilihnya Kecamatan Sungai Beremas sebagai batasan spasial, tidak terlepas dari hasil temuan, baik sumber-sumber *oral history* maupun penelitian-penelitian terdahulu

⁶ Bassam Tibi, *Masyarakat Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), h. 52. Lihat juga Dilip Hiro, *Marxisme dan Islam*, terjemahan, (Jakarta: Inisiasi Press, 2008).

yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang Penulis angkat, dimana Kecamatan Sungai Beremas termasuk kenagarian yang paling banyak masyarakatnya masuk dalam kategori “orang terlibat”, terutama golongan B, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pasaman Barat.⁷ Kecamatan Sungai Beremas juga dikenal dari dahulunya sebagai tipikal masyarakat terbuka (*open society*) serta dikenal sebagai masyarakat yang “gandrung berpolitik” atau dalam bahasa Gusti Asnan, masyarakat yang tingkat *melek politik*-nya tinggi, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Pasaman Barat.

Lingkup Keilmuan

Tesis ini dapat digolongkan ke dalam disiplin ilmu sejarah, karena disiplin ilmu sejarah ini mempelajari dinamika dan perkembangan manusia pada masa lampau.⁸ Demikian pula ilmu sejarah mempunyai beberapa lapangan khusus atau tematis dalam mendekati obyek sejarah, seperti sejarah social, sejarah militer, sejarah politik dan sebagainya. Topik yang Penulis angkat terkait dengan eksistensi, dinamika dan perkembangan Gerwani sebagai organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial politik, maka lingkup keilmuan tesis ini termasuk kedalam kategori sejarah sosial politik.

Tinjauan Pustaka

Sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya kerancuan objek studi dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa

buah buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku pertama berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*.⁹

Buku ini membahas mengenai proses restrukturalisasi hubungan gender dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Secara umum, buku ini membahas mengenai penelitian tentang gender dan gerakan perempuan Indonesia menjelang abad ke-20 sampai tahun 1955. Lebih spesifik, buku ini membahas mengenai Gerwani mulai dari berdirinya, ideologi dan perkembangannya sampai dengan peristiwa 30 September 1965. Buku ini dapat memberikan kontribusi, khususnya pada saat ada keinginan dari kalangan sejarawan untuk merekonstruksi dan mengkaji ulang sejarah formal yang telah dibakukan oleh penguasa (baca : rezim yang berkuasa) selama ini. Dengan paradigma gender¹⁰, penulis buku ini bukan hanya berhasil melakukan penelusuran sejarah yang tersembunyi tentang gerakan perempuan di Indonesia, tapi juga mendekonstruksi bangunan berfikir sebuah masyarakat dari rezim yang mempresentasikan dominasi “berfikir laki-laki”.

Relevansi buku ini dengan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai bahan komparasi bagi kedudukan wanita di Indonesia terutama Gerwani sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan di bidang politik nasional. Penulis buku ini berusaha untuk tidak hanya mengungkap kebohongan-kebohongan yang terjadi selama ini, tetapi juga menyatakan sesuatu tentang latar belakang oposisi

⁷ Arsip dari KaBUTER Kecamatan Sungai Beremas/1974. Pernah dibahas Yudia Warman, “PKI di Sarang Muhammadiyah: Studi Kasus Perkembangan PKI di Kenagarian Air Bangis 1965-1998”, *Skripsi SI* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2006.

⁸ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 311

⁹ Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1999)

¹⁰ Lihat www.kalyanamitra.org/sejarah/perspektif laki-laki/html/diunggah tanggal 16 Oktober 2010.

seksual¹¹, atas dasar konsepsi politik, dalam hal ini lahirnya “Orde Baru”. Dengan menelaah buku tersebut, permasalahan dalam tesis ini dapat dikaji secara kritis dan proporsional. Buku kedua, tepatnya hasil penelitian yang berjudul *PKI di Sarang Muhammadiyah : Studi Kasus Perkembangan PKI di Kenagarian Air Bangis 1965-1998*.¹²

Hasil penelitian skripsi sarjana Strata Satu di atas, mendeskripsikan secara diakronik dinamika perlakuan politik yang dialami oleh para bekas simpatisan dan anggota, yang diistilahkan secara kultural sebagai “orang yang terlibat”, di Kenagarian Air Bangis. Deskripsi secara diakronik ini tanpa melihat proses eksistensi awal PKI di daerah bersangkutan serta tidak menganalisis dinamika PKI hingga dibubarkan. Ini menjadi salah satu kelemahan diantara cukup banyak kelemahan yang dijumpai dalam penelitian yang hanya terfokus pada masa rezim Orde Baru ini. Akan tetapi, penelitian ini memiliki relevansi yang cukup kontributif bagi penulisan tesis karena memberikan data-data yang bersifat dokumentasi terutama yang berkaitan dengan daftar nama-nama “orang yang terlibat” baik yang masuk dalam kategori B ataupun C. Dalam daftar nama tersebut, juga *include* nama-nama bekas anggota Gerwani di Kenagarian Air Bangis.

Demikian juga halnya dengan penelitian yang berjudul *Gerwani di Kecamatan Sungai Beremas Pasaman*

*Barat : 1965-2010*¹³ yang hanya lebih fokus kepada deskripsi diakronik “nasib” para bekas anggota Gerwani, terutama yang masih hidup. Penelitian ini menjadikan *oral history* sebagai pendekatannya dengan mewawancarai beberapa anggota Gerwani yang masih hidup, terutama yang berkaitan dengan *memory*¹⁴ yang masih melekat dalam pikiran mereka. Secara umum, dua penelitian ini memberikan kontribusi sumber bagi Penulis untuk memudahkan melacak sumber-sumber primer.

Selanjutnya, buku yang berjudul *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*.¹⁵ Buku ini membahas mengenai wanita dan kedudukannya di dalam hukum adapt maupun hukum Negara. Membahas masalah hukum dalam perkawinan, perceraian, hak dan kewajibannya sebagai ibu serta istri. Buku ini berisi pula tahapan-tahapan perjuangan wanita dalam memperoleh kedudukannya di dalam hukum dari masa penjajahan Belanda sampai Negara Republik Indonesia. Perjuangan perintis wanita di Indonesia sebagai dasar pemikiran dalam memperoleh kedudukan dalam masyarakat dibahas secara jelas dalam buku ini.

Relevansi buku ini dengan permasalahan yang ditulis adalah dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi kedudukan wanita di Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga

¹¹ Analisis artikel Ariel Haeryanto, lihat www.ilhamfadli.blogspot.com/resensiarieilheryanto/html diunggah tanggal 17 Oktober 2010

¹² Yudia Warman, “PKI di Sarang Muhammadiyah: Studi Kasus Perkembangan PKI di Kenagarian Air Bangis 1965-1998”, *Skripsi S1 Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2006*.

¹³ Nurlatifah, “Gerwani di Kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat 1965-2000”, *Skripsi S1 Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010*.

¹⁴ Pernah penulis bahas dalam sebuah makalah dan dipublish di personal weblog: www.ilhamfadli.blogspot.com/pendekat-an-memori-kolektif dalam melihat perilaku social politik dalam pemilihan umum/html. Diunggah tanggal 17 Oktober 2010

¹⁵ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)

masa kemerdekaan. Menurut Penulis, teknik pengumpulan data dilakukan secara cermat dan sangat teliti melalui analisa-analisa yang sangat akurat. Didukung dengan gambar-gambar aktifitas dan keberhasilan kaum wanita yang diukur dengan data-data statistik dari berbagai bentuk. Secara detail, buku ini menggambarkan usaha kaum wanita dalam masyarakat dari zaman penjajahan sampai masa pembangunan dewasa ini. Buku ini memiliki kelemahan, yaitu digunakannya istilah-istilah yang *law specific*, atau sangat spesifik hukum, sehingga kalangan di luar bidang itu agak menemui kesulitan untuk memahaminya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca yang bukan berasal dari kalangan praktisi hukum.

Buku selanjutnya adalah *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* yang memuat sejarah pergerakan wanita di Indonesia secara kronologi dari mulai abad ke-19 hingga abad ke-20, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok dalam wadah organisasi tertentu. Perkembangan dan peranan berbagai organisasi wanita yang ada pada pra-kemerdekaan sampai Indonesia meraih kemerdekaannya, dibahas dengan komprehensif dalam buku ini dengan menggunakan analisis sinkronik. Buku ini dapat dijadikan sebagai sumber keterangan awal mengenai pergerakan wanita di Indonesia termasuk dalam hal ini Gerakan Wanita Indonesia (sebelumnya bernama Gerwis) dalam aktifitasnya sebagai salah satu organisasi wanita di masa-masa perjuangan.

Sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan buku ini, Penulis lihat, cukup akurat karena banyak didukung oleh sumber-sumber primer seperti wawancara dengan beberapa bekas tokoh-tokoh wanita yang terlibat langsung. Sumber lain yang digunakan adalah surat kabar sezaman, autobiografi dan sumber-sumber pendukung lainnya yang mempunyai

relevansi dengan isi buku. Penulisan dalam buku ini menggunakan tata kalimat yang lugas agar mudah dipahami. Sedangkan kelemahan buku ini antara lain secara substansial hanya merupakan deskripsi umum yang bersifat makro, karena begitu panjang rentang waktu/periode yang dicakup dengan tema umum dan luas. Secara kuantitas terlalu tebal karena memuat semua hasil Kongres Wanita Indonesia sampai tahun 1978. Relevansi buku ini dengan permasalahan yang ditulis adalah sebagai bahan pembandingan bagi peranan organisasi-organisasi wanita di Indonesia dari pra-kemerdekaan sampai pada masa kemerdekaan.

Kemudian, Reni Nuryanti, "*Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*" yang diterbitkan oleh Tiara Wacana Yogyakarta.¹⁶ Di dalam buku ini dipaparkan pengalaman luar biasa dari perempuan-perempuan biasa di masa konflik dan perang. Dengan meyakini bahwa masih banyak "rongga kosong" dalam penulisan sejarah PRRI, penulis buku ini mengisi rongga-rongga tersebut dengan berbagai testimoni dari perempuan Minangkabau yang menjadi saksi mata sekaligus pelaku yang terlibat langsung di berbagai peristiwa pada masa Dewan Banteng dan PRRI.

Penuturan tentang perjuangan dan penderitaan mereka diungkapkan secara *blak-blakan*. Jika dikatakan PRRI telah mengguncang mental masyarakat Sumatera Barat, maka bagian terbesar dari guncangan mental itu sesungguhnya menimpa kaum perempuan. Mereka tak jarang mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual : diinterogasi dan disekap, terpisah dari suami, anak, ataupun saudara; bahkan sebagian di antaranya dipaksa menjadi *ganja kayu* atau *ganja*

¹⁶ Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011)

batu. Buku ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ini untuk memahami perkembangan Gerwani di Minangkabau serta posisi Gerwani dalam konstelasi politik daerah pada masanya.

Kerangka Teoritis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan konsep perubahan perilaku politik, dalam batasan tertentu juga konsep pergeseran pilihan perilaku ataupun pergeseran pilihan ideologi politik.¹⁷ Pertanyaan-pertanyaan dasar dari konsep tersebut adalah : "Mengapa seseorang ataupun sekelompok orang terhadap ideologi politik cenderung konsisten, sementara yang lainnya berubah-ubah ? Mengapa seseorang ataupun sekelompok orang memilih salah satu ideologi politik, sementara yang lain tidak ? Mengapa ada yang loyal, tapi pada bagian lain ada yang labil ? Faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang ataupun sekelompok orang memilih ideologi politik tertentu pada satu masa tertentu pula ?".

Secara teoritis konseptual, pertanyaan-pertanyaan diatas bisa dijawab dengan tiga perspektif yaitu perspektif psikologis, sosiologis dan rasional politis.

1. Perspektif Psikologis

Menurut perspektif ini, seseorang atau sekelompok orang menentukan pilihan mereka, khususnya terhadap pilihan ideologi ataupun pilihan politik, karena kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Ini berkaitan erat dengan sikap. Dalam konteks ini, maka pertanyaan yang bisa dimunculkan

adalah, "mengapa perspektif psikologis menganggap sikap sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah pilihan ideologis ataupun politis ?".

Sosiolog politik, Maurice Duverger mengatakan bahwa fungsi sikap tersebut ada tiga, yaitu : (1). Sikap merupakan fungsi dari kepentingan dimana penilaian suatu objek diberikan berdasarkan kepada motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. (2). Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri dimana seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan, dan (3). Sikap merupakan fungsi eksternalisasi atau pertahanan diri dimana sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik atau tekanan psikis yang mungkin terwujud kepada mekanisme pertahanan diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi ataupun identifikasi.¹⁸

Dalam konteks psikologi sosial, sikap bukanlah sesuatu yang bersifat telah ada sejak awal, akan tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, sejak lahir hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi ini kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan institusi kemasyarakatan atau ideologi tertentu yang berbentuk simpati. Ikatan psikologis ini kemudian dikenal dengan istilah identifikasi. Konsep identifikasi dijadikan sebagai variabel sentral dalam menjelaskan mengapa seseorang memilih ideologi tertentu. Perspektif ini melihat bahwa hubungan antara perilaku identifikasi dengan perilaku

¹⁷ Martin W. Lipset, *Pengantar Politik Perbandingan*, terjemahan, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. xvii. Sedangkan Samuel P. Huntington menggunakan konsep perubahan pilihan ideologis. Lihat Samuel P. Huntington, *Perubahan Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, terjemahan (Jakarta: Rosdakarya, 1999), h. 13-18

¹⁸ Maurice Duverger, *Pengantar Sosiologi Politik*, edisi revisi, terjemahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 19-21

memilih sudah menjadi aksioma dimana proses identifikasi tersebut dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi), bahkan sepanjang hidup.

2. Perspektif Sosiologis

Perspektif ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial (umur, jenis kelamin, pilihan institusi keagamaan) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan perilaku seseorang dalam menentukan pilihan terhadap ideologi tertentu. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, profesi, kelompok okupasi, *pressure group* dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, perkawanan atau kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku seseorang karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.¹⁹

Walaupun perspektif ini secara epistemologis *debatable* untuk "diterapkan" dalam beberapa kasus historis-sosiologis di Indonesia, karena di Indonesia tidak mengenal adanya kelas-kelas yang "jelas dan kaku" terutama berdasarkan status ekonomi, tapi perspektif ini bisa digunakan untuk penelitian ini. Ide dasar perspektif ini bisa menjadi model pendekatan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang memilih loyal ataupun bergeser/berubah terhadap ideologi tertentu, terutama ide tentang pengelompokan masyarakat dari aspek tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan/profesi maupun aspek tingkat pendidikan.

Perspektif Rasional Politis

Pada prinsipnya, pendekatan ini diadopsi dari ilmu ekonomi. Adanya analogi antara pasar (ekonomi) dengan pilihan terhadap suatu ideologi (politik) tertentu. Apabila secara ekonomi anggota masyarakat dapat bertindak secara rasional yaitu menekan biaya sekecil kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik (khususnya berkaitan dengan pilihan terhadap ideologi tertentu), masyarakat akan dapat bertindak secara rasional pula dengan memberikan pilihan terhadap suatu ideologi (politik) tertentu apabila mereka merasa mendapatkan keuntungan, baik keuntungan *riil* maupun keuntungan *latent*.²⁰ Oleh karena itu, loyalitas ataupun pergeseran pilihan tersebut (selalu) berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang tidak hanya berupa memilih alternatif yang menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian paling sedikit, akan tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko paling kecil. Namun perspektif rasional ini bisa dikritisi bila diaplikasikan dalam penelitian sejarah, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Perspektif ini menuntut seseorang ataupun masyarakat responsif terhadap isu-isu tertentu karena dengan ini ia bisa mempertimbangkan resiko yang akan ditemuinya, sekecil apapun. Perspektif ini

²⁰ *Ibid.*, h. 36-37. Lihat juga, misalnya, Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa dan Peranannya Pada Masa Kolonial Belanda* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). Lihat juga Mohammad Asfar, "*Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Kiai pada Masa Orde Baru*" (Jakarta: Gramedia, 1997) dan Mochtar Pabottinggi, *Dinamika Politik Ummat Islam pada Masa Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1984). Lihat Taufik Abdullah, "Diktum Keramat dalam Sejarah Intelektual Minangkabau", *Kertas Kerja dalam Seminar ICMi Sumatera Barat*, Bukittinggi: 22-23 Januari 2000, h. 7-9

¹⁹*Ibid.*, h. 27

juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang terhadap pilihan ideologi (politik) tertentu memiliki hubungan adanya tekanan-tekanan politik seperti tekanan struktural. Tekanan bisa dalam bentuk halus (mobilisasi) maupun paksaan.

Perspektif rasional dalam konteks penelitian ini, masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab secara memuaskan. Persoalan penting berasal dari asumsi perspektif rasional yang menganggap bahwa seseorang menentukan pilihan (politik)nya berdasarkan pada informasi akurat yang dimilikinya, sulit untuk dijelaskan pada masyarakat pedesaan di tahun 1950-an dan 1960-an. Namun, bila dihubungkan dengan asumsi dasar lain dalam perspektif ini yaitu bahwa perilaku seseorang dalam melakukan pilihan terhadap ideologi (politik) tertentu merupakan keputusan yang bisa diambil cepat karena tergantung pada situasi politik tertentu, maka perspektif rasional bisa dijadikan logika berfikir dalam analisis penelitian ini.

Munculnya suatu gerakan sosial disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks (*complicated*). Pada pembahasan selanjutnya, agar karya ini menjadi karya analitis, Penulis menggunakan pendekatan sejarah sosial (politik). Pendekatan ini digunakan berdasarkan pada kenyataan bahwa peristiwa yang akan dibahas menyangkut masalah sosial dan politik. Masalah sosial menyangkut masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi dalam sebuah organisasi, dan masalah politik menyangkut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi massa yang berkaitan dalam lingkup politik, dalam hal ini organisasi tersebut adalah Gerwani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika Aktifis Perempuan Islam Berpaling ke “Palu Arit”

Dalam perspektif *evolusionisme* Darwin, “tradisi politisi” dan kehilangan satu generasi tersebut, biasanya disebabkan karena ada “*missing-link*”, suatu kondisi, waktu atau *event* yang mengakibatkan kontinuitas sebuah peristiwa atau fenomena sosial politik, terputus. Dalam konteks Kecamatan Sungai Beremas, bila dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tersebut bisa ditelusuri dari peristiwa tahun 1965 dengan Gerwani sebagai *event*-nya. Peristiwa tahun 1965, diasumsikan memberi dampak politik luar biasa kepada aktifis-aktifis potensial wanita Minangkabau dan “keturunannya”, khususnya di Kecamatan Sungai Beremas, untuk meninggalkan “tradisi politisi” yang telah mereka bina selama ini.

Karena faktor politik, tepatnya “kecelakaan politik”, Gerwani yang dikembangkan oleh wanita-wanita sadar politik Indonesia, akhirnya dianggap sebagai korban politik sebuah rezim yang membutuhkan mitos politik. Mitos Gerwani yang tersebar dan disebarkan dalam masyarakat secara sistematis oleh rezim Orde Baru sebagai pelaku dalam peristiwa pembunuhan para Jenderal 30 September 1965.²¹ Mitos Gerwani yang tersebar dan disebarkan dalam masyarakat selama ini

²¹ Teori Mitos Politik, yang bernuansa Antropologi Politik ini diperkenalkan oleh Roland Barthes. Kajian tentang Mitos Politik dalam melihat Gerwani ini pernah dilakukan oleh Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth Mc. Vey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1971) yang dikutip dari R.T. Hasworo, *Penangkapan dan Pembunuhan PKI dan Gerwani di Jawa Tengah*, (Jakarta: Lentera, 2005) edisi e-Book/PDF (diunggah tanggal 7 Mei 2011)

merupakan alat untuk pencapaian dan pemeliharaan kekuasaan oleh rezim tertentu.

Pengkondisian mitos yang berbau politik ini secara sistematis, membuat aktivitas Gerwani dimatikan. Mereka kemudian dikaitkan terlibat dengan G 30 September 1965 tersebut. Para aktivis Gerwani yang pada umumnya adalah wanita-wanita yang sadar politik banyak yang dipenjarakan tanpa ada proses hukum sebelumnya. Mereka dijauhkan dari keluarga dan dipenjara, bahkan banyak yang tidak diproses sesuai proses hukum normal.

Tak bisa dipungkiri, para aktivis Gerwani digambarkan sebagai sosok yang kejam dan tak berperikemanusiaan.²² Bahkan sampai sekarang, kata Gerwani masih bersifat konotatif bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Masyarakat masih mengidentikkan Gerwani dengan kekejaman. Mitos politik ini bergerak secara massif dan menjadi memori kolektif masyarakat Indonesia. Akibatnya, konsekuensi sosial, hukum dan administratif-politik tidak hanya dirasakan oleh tokoh-tokoh Gerwani di tingkat pusat ataupun propinsi, tapi juga dirasakan oleh tokoh-tokoh dan simpatisan Gerwani di tingkat daerah.

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) adalah salah satu gerakan perempuan progresif yang pernah ada di Indonesia. Dianggap sebagai organisasi perempuan yang mencerdaskan dan mendahului zamannya. Kesetaraan gender, penolakan terhadap poligami, dan perlunya perempuan terlibat dalam proses politik merupakan beberapa agenda yang mereka usung. Punya nyali dan lantang menentang berbagai bentuk diskriminasi gender yang kala itu masih

mengejala.²³ Meneriakan penentangan model sosial patriarki yang menyelimuti relasi sosial di berbagai bidang, pada masanya.

Banyak diantara mereka yang selama dikenal sebagai wanita-wanita progresif, pintar dan sadar politik di daerah mereka masing-masing, juga menerima konsekuensi ini. Mereka yang pada awalnya memiliki potensi besar, setidaknya untuk ukuran daerah dan zaman mereka, karena mitos politik yang dikembangkan secara massif oleh rezim Orde Baru, akhirnya menjadi wanita-wanita yang dimusuhi, dipersempit ruang geraknya serta diberi label yang sangat diskriminatif. Mereka dan keturunannya kemudian menjalani kehidupan sosial politik mereka dalam ranah yang dipenuhi oleh ketakutan dan kecurigaan.

Padahal kehadiran Gerwani sebagai sebuah organisasi wanita modern di Indonesia, pada prinsipnya justru membuat sejarah wanita Indonesia seharusnya berhutang budi. Peran aktif wanita Indonesia dalam sejarah yang selama ini bersifat personal, parsial dan terfokus pada strata sosial dan isu tertentu, justru oleh Gerwani disatukan.

"Historia me absolvera", biarlah sejarah yang akan membebaskan saya, demikian kata Fidel Castro ketika ia disidangkan karena tuduhan makar terhadap pemerintahan yang sah negara Cuba.²⁴ Apa yang terjadi dan diungkapkan

²³ Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1999), Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007 dan Ridjal Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993).

²⁴ Henry Simon Reid, *Fidel & Che : Persahabatan Revolusioner Tak Tertandingi*, terjemahan, (Jakarta: Penerbit Literati, 2010), h. ix

²² John Rossa, Hilmar Farid & Ayu Ratih, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 1965*, (Jakarta: Elsam, 2004)

oleh Castro bukanlah sebuah bentuk kepasrahan, akan tetapi ungkapan tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap penilaian sebuah rezim kepadanya. Idealisme dan kebenaran yang diperjuangkan, bisa hilang bahkan direndahkan apabila dinilai dengan ukuran-ukuran kepentingan politik. Akan tetapi, sejarah telah mencatat bahwa kebenaran, apalagi kebenaran yang diperjuangkan tersebut sangat inspiratif, dengan perjalanan waktu akan terbongkar satu demi satu dengan proporsional. Intinya, perjalanan waktulah yang membuat kebenaran itu akan terungkap.

Memang, peran aktif kaum wanita Indonesia cukup signifikan sejak awal abad ke-19. Bukti historis memperlihatkan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh wanita banyak dicatat dalam sejarah perjuangan anak bangsa. Sebutlah, misalnya Nyi Ageng Serang sekitar pertengahan abad ke-19, Martha Christina Tiahahu di Maluku pada tahun 1817-1819, Cut Nya' Dien dan Cut Nya' Meutia dalam perang Aceh tahun 1973-1904, perjuangan emansipatoris Raden Ajeng Kartini tahun 1879-1904, Dewi Sartika 1884-1947, Maria Walenda Maramis tahun 1872-1924 dan Nyi Ahmad Dahlan tahun 1872-1936.²⁵ Sementara di Minangkabau, dalam sejarah cukup banyak gerakan-gerakan perlawanan serta tokoh-tokoh inspiratif yang berasal dari kaum wanita, seperti Rangkayo Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiyah, Rohana Kudus dan Siti Manggopoh. Bila kita menelaah polarisasi sejarah gerakan wanita, dapat dikemukakan bahwa pada mulanya tertuju pada bidang pendidikan. Hal ini tampaknya didasari oleh kesadaran bahwa pendidikan dapat membawa pengaruh yang besar dan signifikan pada perubahan dan kemajuan.

Oleh karena itu, bukanlah tanpa sebab jika tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat Indonesia, baik dahulu maupun sekarang, pada mulanya

bergerak dalam bidang pendidikan. Sebutlah misalnya, Rangkayo Rohana Kudus dan Rahmah El-Yunusiyah, dianggap sebagai tokoh wanita Minangkabau yang pada awalnya bergerak dalam dunia pendidikan. Demikian juga dengan Maria Walenda Maramis di daerah Kawanua (Sulawesi Utara sekarang). Beberapa organisasi wanita yang pertama-tama sekali dibentuk juga berawal dari kesadaran untuk meningkatkan pendidikan wanita.

Ryadi Gunawan²⁶ mengatakan bahwa latar belakang lahirnya berbagai organisasi wanita pada awalnya adalah refleksi dari keinginan beberapa kalangan wanita untuk meningkatkan kepandaian kaumnya. Namun, Gerwani dianggap sebagai organisasi wanita modern Indonesia yang jauh lebih progressif dan mengangkat berbagai isu serta kesadaran politik kaum wanita Indonesia. Tak salah kemudian Gerwani mendapat apresiasi dari kaum wanita pada masa itu. Gerwani mengalami perkembangan yang pesat. Untuk memperkuat basis massa kegiatan Gerwani memang menyentuh berbagai aspek kehidupan politik, sosial, pendidikan, anak, dan ekonomi secara nasional maupun internasional. Seminar ini diikuti delegasi-delegasi dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Manado, Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Djakarta Raya.²⁷

Paparan di atas telah memperlihatkan bahwa secara organisatoris, eksistensi Gerwani telah dianggap signifikan di Sumatera Barat sejak awal tahun 1961. Dengan

²⁶ Ryadi Gunawan, "Dimensi-Dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah", dalam Ridjal Fauzi, *op.cit.*, h. 102

²⁷ Lihat *Harijan Ra'jat*, 7 Januari 1961. Dikutip dari Fitria Tria Utami, "Gerakan Feminisme Progresif di Indonesia", artikel yang dipublish dalam www.kalyanamitra.com (diunduh tanggal 19 Oktober 2010)

²⁵ *Ibid.*, h. 101

mengirimkan delegasi-nya dalam seminar wanita tani di atas, memperlihatkan peran strategis Gerwani Sumatera Barat dalam struktur organisasi Gerwani secara keseluruhan. Ini diasumsikan bahwa Gerwani telah ada di Sumatera Barat sebelum tahun 1961 pasca PRRI (1958).

Perkembangan Gerwani di Kecamatan Sungai Beremas juga diasumsikan berkembang sejak berakhirnya PRRI tersebut. Sebagai sebuah Kenagarian yang terletak di pesisir pantai barat Pasaman Barat, Kecamatan Sungai Beremas dikenal sebagai basis Muhammadiyah di Kabupaten Pasaman Barat dari dulu hingga hingga sekarang. Sementara, Masyumi merupakan Partai Politik era Pemilu 1955 yang berpengaruh di Kecamatan Sungai Beremas. Bahkan sampai sekarang, Masyumi masih dianggap sebagai *romantical party* dikalangan generasi tua. Karena itulah, dalam beberapa pemilihan umum pada masa Orde Baru, Golongan Karya (Golkar) tidak pernah menang di Kecamatan Sungai Beremas.

PPP dianggap sebagai penerus "roh" dan "aura" Masyumi selalu mampu mengalahkan Golkar yang didukung oleh birokrasi dan finansial.²⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sungai Beremas sangat dipengaruhi oleh Muhammadiyah (wanitanya: Nasyiatul Aisyiah atau Aisyiyah) dan Masyumi beserta "turunannya" (PPP) dalam ranah politik, setidaknya pada masa Orde Baru.

Wanita-wanita di Kecamatan Sungai Beremas juga dikenal sebagai wanita yang cukup dinamis dalam berorganisasi. Nasyiatul Aisyiah pada tumbuh dengan baik seiring dengan berkembangnya Muhammadiyah di

daerah ini. Pada era 1950-an, tidak ada dijumpai organisasi wanita selain Nasyiatul Aisyiah di Kecamatan Sungai Beremas.²⁹ Satu-satunya organisasi yang mengakomodir kegiatan-kegiatan sosial keagamaan bahkan politik wanita di Kecamatan Sungai Beremas pada era ini hanyalah Aisyah ini.³⁰ Sebagaimana halnya Muhammadiyah dan Masyumi, Nasyiatul Aisyiah memberi wadah bagi para wanita di Kecamatan Sungai Beremas untuk berimprovisasi dalam bidang kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, peningkatan kemampuan potensi diri bahkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kegiatan politik.

Ketika Elit Politik Islam Meninggalkan Ummat

Ketika PRRI pada tahun 1958 ditumpas, implikasi sosial politik peristiwa ini terasa hingga ke daerah

²⁹ Wawancara dengan H. Syahrudji Tanjung (59 tahun) tanggal 10 Nopember 2010 di Padang. Diperkuat oleh wawancara dengan Waisur Dt. Rajo Lenggang (77 tahun, pj. Wali Nagari Air Bangis 1964-1966) di Air Bangis tanggal 31 Desember 2010. Wawancara lanjutan juga dilakukan pada tanggal 25-1-2011.

³⁰ Wawancara dengan Hj. Encik Mas (73 tahun, Ketua Aisyiah pada era Soekarno dan Orde Baru dan sempat mengikuti beberapa kegiatan Gerwani pada tahun 1964-1965) pada tanggal 28 Agustus 2010 di Air Bangis. Diperkuat Wawancara dengan Hj. A (inisial : 66 tahun) dan Ny. War (inisial : 65 tahun) pada tanggal 31 Desember 2010. Lebih lanjut lihat Amnesty International dalam *Indonesia an Amnesty International Report* (London: Amnesty International Publication, 1977), hal. 31-44. Dikutip dari Bonni Triayana, "Peristiwa Purwodadi : Kasus Pembunuhan Massal Anggota dan Simpatisan PKI Kabupaten Grobogan, 1965-1969", *Skripsi S1* (Oktober 2003), Semarang: Universitas Diponegoro (diunggah dalam bentuk e-book/PDF tanggal 7 April 2011). Data-data diatas juga dibahas secara elaboratif oleh Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, terjemahan, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004.

²⁸ Muhammad Ilham, "Perubahan Perilaku Memilih Ummat Islam dalam Pemilihan Umum 1955-1992 di Kecamatan Sungai Beremas", *Jurnal Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang*, Desember 2000.

phery phery di Sumatera Barat yang selama ini dikuasai oleh Masyumi (partai politik) dan Muhammadiyah (organisasi sosial keagamaan), termasuk di Kecamatan Sungai Beremas. Walaupun memiliki “domain” dan batas yang jelas, tapi Muhammadiyah (Nasyiatul Aisyiah) tidak bisa dipisahkan dengan Masyumi. Sebagai salah satu yang dianggap oleh rezim Soekarno sebagai pendukung PRRI, Masyumi dan tokoh-tokohnya diinterogasi, ditangkap bahkan diintimidasi dan dibunuh. Tokoh-tokoh Masyumi di Kecamatan Sungai Beremas pada umumnya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah.

Pasca ditumpasnya PRRI, beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah banyak yang lari keluar dari Kecamatan Sungai Beremas, terutama ke beberapa daerah di Sumatera Utara bahkan ada yang lari ke Malaysia. Praktis kegiatan Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiah tidak ada. Beberapa wanita Kecamatan Sungai Beremas yang selama ini aktif dalam kegiatan berorganisasi (Nasyiatul Aisyiah) praktis *vakum*.³¹ Dalam masa kevakuman inilah, karena tidak ada organisasi sosial keagamaan lainnya di seperti Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) atau NU (Nahdhatul Ulama), maka kehadiran Gerwani sebagai organisasi yang mengusung kemandirian dan pemberdayaan potensi wanita, bisa berkembang dengan baik.

Gerwani masuk ke Kecamatan Sungai Beremas pada tahun 1961 dan mulai aktif pada tahun 1962. Kehadiran paduan suara wanita pada Upacara 17

Agustus 1962 di Lapangan Hijau Air Bangis memperlihatkan eksistensi Gerwani di Kecamatan Sungai Beremas. Dalam perjalanannya, beberapa kegiatan Nasyiatul Aisyiah diakomodasi oleh Gerwani dengan memberikan perspektif baru, terutama berkaitan dengan politik. Mayoritas anggota Gerwani tersebut adalah anggota/simpatian Nasyiatul Aisyiah selama ini. Sementara pengurus Gerwani sebagian besar adalah pengurus Nasyiatul Aisyiah disamping beberapa orang yang sebelum Gerwani masuk ke Kecamatan Sungai Beremas cenderung tidak aktif dalam organisasi.

Sebagai pengurus Nasyiatul Aisyiah yang kemudian beralih sebagai pengurus dan simpatisan Gerwani, tentunya mereka ini adalah wanita-wanita yang potensial dan sadar politik. Tapi karena mitos politik serta konsekuensi sosial politik yang dibangun oleh rezim Orde Baru, maka mereka kemudian menjadi wanita-wanita yang *termarginalkan* dan mempersepsikan diri mereka dan keturunan sebagai orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa berkembang secara layak. Penulis beranggapan ini merupakan salah satu penyebab mengapa kemudian dalam perkembangan berikutnya, wanita-wanita di pantai barat Pasaman Barat, khususnya di Kecamatan Sungai Beremas, cenderung statis terutama dalam ranah politik. Bisa jadi ini juga merupakan penyebab lain mengapa perkembangan daerah-daerah di pantai barat Pasaman Barat tidak semaju daerah-daerah lain di Pasaman Barat, khususnya pada masa Orde Baru, padahal Sumber Daya Alam daerah-daerah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Kondisi di atas, dalam konteks sejarah politik, disebabkan oleh berbagai variabel. Namun tidak bisa dinafikan bahwa kelompok sosial yang selama ini gandrung dengan kegiatan-

³¹ Ini pernah dibahas oleh Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal ini diteliti oleh Tim Filologi FIBA IAIN Padang, “Naskah Kuno Ulama-Ulama Pasaman”, *Penelitian* (Padang: Puslit IAIN IB Padang, 2010).

kegiatan politik dibawah bimbingan ulama-ulama Masyumi dan Muhammadiyah, justru bermetamorfosis menjadi aktifis politik "kiri" tersebutkan elit politik Masyumi dan Muhammadiyah – yang dikategorikan sebagai ulama – meninggalkan mereka. Realitas politik pada masa itu, pasca PRRI, membuat ulama-ulama ini "menyeleamatkan diri" mereka dari implikasi politik yang dilakukan oleh tentara pusat.

PENUTUP

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ulama merupakan elit sosial yang paling signifikan secara historis-faktual-implikatif. Ini terlihat dari eksistensi dan pengaruh dari Muhammadiyah serta partai Masyumi pada awal tahun 1950 hingga 1957, dua organisasi yang dipengaruhi secara signifikan oleh ulama. Setelah terjadi pemberontakan PRRI tahun 1957 serta dilaksanakannya operasi penumpasan sisa-sisa simpatisan PRRI secara massif di daerah ini pada tahun 1958, terjadi pergeseran preferensi sosial politik umat Islam di Kabupaten Pasaman. Pergeseran dalam rentang waktu yang sangat cepat. Ulama yang selama ini dianggap sebagai rujukan utama dalam menentukan pilihan politik, bergeser kepada elit sosial lainnya, elit politik lokal non-ulama. Pemberontakan PRRI meninggalkan trauma psikologis bagi umat Islam di Kabupaten Pasaman tersebut berkontribusi besar dalam merubah preferensi sosial politik umat Islam dan menurunnya tingkat kepercayaan umat Islam kepada ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Penelitian

Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora

Asvi Warman Adam, *Mengungkap Misteri Sejarah*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010

Asvi Warman Adam & Bambang Purwanto, *Menggugat Historiografi Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2006

Ariel Heryanto, *Perlawanan dalam Diam*, Bandung: Mizan, 2001

Bassam Tibi, *Masyarakat Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998

Dennis Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya*, terjemahan, Jakarta: Gramedia, 1999

Fitria Tria Utami, "Gerakan Feminisme Progresif di Indonesia", artikel yang dipublish dalam www.kalyanamitra.com/diunduh tanggal 19 Oktober 2010

John Rossa & Hilmar Farid, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir : Memahami Pengalaman Korban 1965*, Jakarta:ELSAM, 2004

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2003

Michael Foucault, *Sejarah dan Seksualitas*, terjemahan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Muhammad Ilham (dkk.), "Partisipasi Politik Umat Islam dalam Pemilihan Umum : Analisis Sosiologi Politik 1955-1999", *Penelitian kerjasama Puslit IAIN Imam Bonjol Padang dengan Pemda Kabupaten Pasaman*, 2003

- Muhammad Ilham, "Perubahan Perilaku Memilih Ummat Islam dalam Pemilihan Umum 1955 – 1992 di Kecamatan Sungai Beremas", *Jurnal Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang*, Desember 2000
- Muhammad Sugianto, "Rohana Koedoes dan Shamsiah Fakeh : Peran Historis dalam Tamaddun Islam Nusantara", *Tesis Master* Jabatan Ilmu sejarah FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Nurlatifah, "Gerwani di Kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat 1965-2000", *Skripsi S1* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010.
- Pramoedya Ananta Toer, *Panggil Saja Aku Kartini*, Jakarta: Hasta Mitra, 1999
- Ridjal Fauzi, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993, terutama bab I.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1999
- Suratmin dkk., *Biografi Tokoh Perempuan Indonesia Pertama*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, 1991
- Taufik Abdullah, Abdurrahman Surjomihardjo. ed., *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985, hal. 311
- Yudia Warman, "PKI di Sarang Muhammadiyah : Studi Kasus Perkembangan PKI di Kenagarian Air Bangis 1965-1998", *Skripsi S1* Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2006.

Arsip

Arsip dari KaBUTER Kecamatan Sungai Beremas tahun 1974/

Foto (Dokumen Pribadi) Waisur Dt.Rajo Lenggang/Upacara 17 Agustus 1962

Bulletin KOBA, Jakarta-Air Bangis, Edisi Idhul Fithri 2000

Monografi Kenagarian Kenagarian Air Bangis 1967 (stensilan)

